

HUKUM DAGANG - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2017

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 7, LD KABUPATEN TEBO 2017/NO.7 , 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dan masyarakat diperlukan peningkatan sarana prasarana dan kinerja perusahaan; bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro dilakukan dalam rangka penguatan modal; bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo, maksud dan tujuan penyertaan modal, bentuk dan nilai penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran pelaporan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Desember 2017.

Batang Tubuh : 8 Halaman